Sriwijaya Journal of International Relations

Vol 1 No. 1, Juni 2021
Halaman 34-49

# INDONESIA CHARM OFFENSIVE: KEKUATAN BANTUAN LUAR NEGERI INDONESIA TERHADAP NEGARA PASIFIK SELATAN PADA ISU KEMERDEKAAN PAPUA BARAT

*Angga Santa Gideon*[1]

[1]*Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia*

**SUBMISION TRACK**

Recieved: 15 Mei 2021
Final Revision: 30 Mei 2021
Available Online: 30 Juni 2021

**KEYWORD**

Charm Offensive, Foreign Aid, South Pacific, West Papua

**ABSTRACT**

*This article aims to discuss how foreign aid power to South Pacific countries on West Papua independence uses the Charm Offensive approach. Charm Offensive is a country's diplomacy method by providing foreign aid or investment to a recipient country to become an ally or support the country's political-economic motives. Charm Offensive requires high costs because it has to provide assistance and investment to other countries. However, the consideration is that this diplomacy method is very effective for countries that are indeed requesting assistance. Through this article, Charm Offensive will maintain its implementation through Indonesia's motives in providing foreign assistance to South Pacific countries. The motive was then relegated to take a deeper look at whether foreign assistance effectively quelled the rhetoric of South Pacific countries in supporting West Papua independence.*

**KATA KUNCI**

Charm Offensive, Bantuan Luar Negeri, Pasifik Selatan, Papua Barat.

**CORRESPONDENCE**

Email : anggasg@upnvj.ac.id

**ABSTRAK**

Artikel ini bertujuan untuk membahas mengenai bagaimana kekuatan bantuan luar negeri Indonesia terhadap negara Pasifik Selatan pada isu kemerdekaan Papua Barat menggunakan pendekatan Charm Offensive. Charm Offensive atau bisa yang disebut juga dengan diplomasi pesona ofensif merupakan sebuah metode diplomasi suatu negara dengan memberikan bantuan luar negeri atau investasi kepada negara resipien dengan tujuan menjadi sekutu atau mendukung motif politik-ekonomi negara tersebut. Charm Offensive membutuhkan biaya yang mahal karena harus memberikan bantuan dan investasi kepada negara lain, namun yang menjadi pertimbangannya adalah metode diplomasi ini menjadi sangat efektif bagi negara-negara yang memang sedang memerlukan bantuan. Melalui artikel ini, Charm Offensive akan dikaitkan implementasinya melalui motif Indonesia dalam memberikan bantuan luar negeri kepada negara-negara Pasifik Selatan. Motif tersebut kemudian diturunkan kembali untuk melihat lebih dalam apakah bantuan luar negeri efektif untuk meredam retorika negara-negara Pasifik Selatan dalam mendukung kemerdekaan Papua Barat.

## PENDAHULUAN

Provinsi Papua & Papua Barat yang merupakan kawasan paling timur Indonesia saat ini, tergabung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Perjanjian New York pada tanggal 15 Agustus 1962. Sejak tahun 1962 konflik yang bersifat vertikal maupun horizontal selalu terjadi di wilayah Papua itu sendiri, yang antara lain dipicu oleh masalah politik masyarakat Papua,

kesenjangan dan ketidakmerataan ekonomi Papua, dan stigmatisasi dan kelas antara masyarakat Papua dan non-penduduk asli (Sugandi, 2008). Dengan berbagai kompleksitas masalah yang terjadi di Papua tersebut, mendorong adanya potensi masyarakat untuk melakukan berbagai gerakan pemberontakan untuk keluar dari NKRI.

Setidaknya terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab-penyebab masyarakat Papua cenderung cepat dalam melakukan gerakan dan pemberontakan, seperti : (1) kebijakan dan pembangunan yang gagal di Papua; (2) permasalahan identitas, rasial, budaya, etnis, dan agama; (3) persepsi sejarah; (4) sekuritisasi oleh militer; (5) keberadaan perusahaan asing dan kapitalisme daerah (Chauvel, 2004). Beberapa basis faktor muncul dan masifnya gerakan pemberontak di Papua yang diutarakan oleh Chauvel tersebut, menjadi satu permasalahan yang utama yang dari masa ke masa terjadi dan sulit untuk terselesaikan. Selain itu ada satu hal utama yang mungkin hingga saat ini menjadi perdebatan antara Pemerintah Indonesia dan masyarakat Papua, yaitu mengenai keabsahan pelaksanaan Referendum Papua melalui Penetapan Pendapat Rakyat (PEPERA) pada tahun 1969 (Yambeyapdi, 2018). PEPERA ini menimbulkan banyak persepsi di masyarakat Papua yang salah satunya ialah terjadi pemaksaan suara pada masa Orde Baru. Maka dari itu berkaca pada hal tersebut banyak anak muda Papua yang sangat mudah untuk diajak menjadi bagian dari kelompok pro-kemerdekaan mengingat tingginya retorik penjajahan oleh Indonesia di antara masyarakat Papua. Tentu saja berbagai kebijakan dan dialog yang saat ini selalu dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dengan perwakilan masyarakat Papua pun selalu menemui jalan yang buntu, karena masih berkeliarannya persepsi tidak pasti yang timbul pada banyak masyarakat Papua.

Permasalahan lainnya yang sangat pelik dihadapi oleh Indonesia karena isu mengenai kemerdekaan Papua adalah mengenai dukungan negara-negara khususnya negara kawasan Pasifik Selatan yang selalu bersuara mengenai HAM Papua dan sebagainya di forum-forum internasional. Kondisi ini disebut dengan internasionalisasi isu Papua. Salah satu negaranya ialah Vanuatu yang cukup konsisten dan gencar mengangkat isu mengenai Papua. Setiap kesempatan yang didapat Vanuatu di media atau di forum internasional jarang sekali mengabaikan peluangnya untuk mengangkat isu kemerdekaan Papua. Vanuatu senantiasa mendesak *Melanesian Pioneer Group* untuk mengutarakan posisinya terkait isu Papua merdeka dan menyampaikan isu ini

dengan mengajak negara Pasifik Selatan lainnya untuk bersimpati pada kondisi Papua pada penyelenggaraan *Pacific Island Forum* (Absulsalam, 2019). Selain Vanuatu, juga ada Kepulauan Solomon yang seringkali dalam pidato umum pemimpinnya di sidang umum tahunan PBB, menyuarakan dan mendesak negara-negara lain untuk menarik perhatian pada isu kemerdekaan Papua (Lawson, 2016). Seringkali Indonesia mencoba untuk merespon ungkapan-ungkapan yang disampaikan oleh negara-negara tersebut secara langsung, namun secara pasti tangkasan melalui kata-kata atau sekadar pernyataan pun dirasa kurang cukup, sehingga perlu aksi diplomasi yang secara teknikal mesti dilakukan oleh Indonesia kepada negara-negara tersebut. Sebagai patron teknikal, Indonesia sudah memulainya dengan rangkaian diplomasi bantuan luar negeri melalui *Indonesian Aid*, *Pacific Elevation* ataupun *Indonesia-South Pacific Forum* (ISPF).

Berdasarkan kondisi-kondisi yang dihadapi oleh Indonesia mengenai isu Papua tersebut, penulis tertarik untuk menelisik diplomasi teknikal yang dilakukan oleh Indonesia kepada negara-negara di Pasifik Selatan dengan memfokuskan bahasan penelitian sebagai berikut ini. Bagaimana tindakan dan tantangan Indonesia dalam menjalankan *Charm Offensive* pada isu-isu Papua di negara-negara Pasifik Selatan melalui bantuan luar negeri? Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, penulis menelaahnya menggunakan konsep kepentingan nasional, bantuan luar negeri dan *Charm Offensive*.

## KERANGKA TEORI

Dalam artikel ini, penulis menggunakan tiga konsep untuk menguraikan tindakan dan tantangan Indonesia dalam menjalankan *Charm Offensive* pada isu-isu Papua di negara-negara Pasifik Selatan, yaitu kepentingan nasional, bantuan luar negeri dan *Charm Offensive*.

### Kepentingan Nasional

Sebagai negara yang berdaulat, tentu saja negara memiliki serangkaian cara maupun tindakan agar dapat terpenuhi apa yang menjadi kepentingannya. Kepentingan nasional memiliki korelasi dengan konsep *power* atau kekuatan maupun kekuasaan. Ketika kepentingan nasional terpenuhi, maka hal itu menunjukkan bahwa power negara tersebut juga berskala besar. Secara dinamis, kepentingan nasional diiringi dengan berbagai rencana yang matang untuk mengakumulasi capital gain bagi kebutuhan didalam negeri. Mengacu pada pemikiran Alexander Wendt, antara negara dan kepentingan nasional memiliki keterkaitan

yang kuat. Sebagai pemikir konstruktivisme, negara disebutkan sebagai unit analisis utama dalam hal kepentingan nasional, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa juga terdapat pengaruh dari transformasi kepentingan nasional, yang tergantung pada individu pengambilan kebijakan luar negeri, polarisasi politik internasional maupun kegiatan ekonomi-politik (Burchill, 2003). Umumnya, kepentingan nasional lebih mengarah pada pemenuhan kesejahteraan rakyat di dalam negeri (Oppenheim, 1987). Kepentingan nasional ini juga tujuannya adalah untuk mempertahankan bagaimana identitas dari fisik negara, kultur dan juga haluan politik suatu negara (Navari, 2016).

Kepentingan nasional diaktualisasikan sebagai suatu ekspektasi yang bertujuan untuk menghubungkan berbagai integrasi serta meningkatkan power di kancah politik internasional. Kepentingan nasional juga seringkali direlasikan dengan bentuk hubungan kerjasama antar negara. Kerjasama negara bisa disebut dengan *sharing of power*, yang dimana akan muncul *relative gains* dari bentuk kepentingan nasional. Retorika kepentingan nasional dipergunakan melalui cara-cara yang sifatnya softpower seperti pada umumnya adalah diplomasi. Dalam halnya kepentingan Indonesia di negara kawasan Pasifik, maka secara singkat Indonesia memiliki suatu tujuan agar pasar ekspor melalui diplomasi ekonominya bisa sampai ke negara-negara tersebut (Media Indonesia, 2019). Selain itu, isu terbarunya ialah kerjasama dalam bentuk bantuan kesejahteraan ini dapat dipergunakan untuk meningkatkan hubungan antar Indonesia dan negara-negara Pasifik Selatan, mengingat adanya retorika yang sering di gaungkan oleh negara-negara seperti Vanuatu dan Kepulauan Solomon mengenai isu hak asasi manusia di Papua Barat dengan mendukung adanya pembebasan wilayah Papua sebagai bagian dari Indonesia (Salya, 2017).

**Bantuan Luar Negeri**

Dalam mengimplementasikan kepentingan nasionalnya atau sebagai upaya dalam kontribusi kemanusiaan dan damai di tingkat global, seringkali negara menggunakan bantuan luar negeri sebagai instrumennya. Dalam bantuan luar negeri tersebut terdapat dua negara atau lebih yang saling berperan, yaitu negara atau institusi sebagai pendonor dan negara yang menjadi resipien atau penerima bantuan luar negeri. Terkadang bantuan luar negeri dapat dipergunakan sebagai penunjuk simbolis kekuatan oleh negara-negara berkekuatan besar kepada negara-negara dengan kekuatan dibawahnya (Hattori, 2001). Simbolisasi kekuatan yang ada di dalam bantuan luar negeri terkadang menyisipkan

iming-iming sebagai pembangunan global secara bersama yang dimana di dalamnya seperti sebuah *game theory* "*carrot & stick"*.

Menurut Andersson (2009) terdapat beberapa motif dari pendonor untuk melakukan bantuan luar negeri, antara lain seperti: (1) motif kemanusiaan; (2) motif ekonomi; (3) motif strategik; (4) motif ideologi; (5) motif identitas; dan (6) motif lingkungan. Sebagai contoh ketika negara-negara OECD memberikan bantuan sebesar US$1,1 triliun di tahun 1988 kepada Rezim Mobutu di Republik Demokratik Kongo, negara-negara tersebut memiliki motif politik atau strategik untuk melakukan *counter* terhadap kelompok-kelompok komunis di Kongo. Motif itu terlihat ketika pada tahun 1992, bantuan yang diterima turun hingga menjadi US$ 152 juta (Ramakhrisna, 2018). Melihat contoh tersebut sebenarnya bisa dikatakan terdapat banyak motif dari adanya bantuan luar negeri dari negara donor ke negara resipien, yang tidak hanya sekedar sebagai bentuk kepedulian.

Konsep bantuan luar negeri dalam artikel ini akan meninjau bagaimana patron Indonesia melalui *Indonesian Aid* dan penyelenggaraan *Pacific Elevation* sebagai instrumennya. Berbagai bantuan seperti dana pembangunan, bantuan infrastruktur dan sebagainya menjadi bagian-bagian peristiwa yang ditelusuri dalam artikel ini.

**Charm Offensive**

Kebijakan luar negeri Indonesia sangat berkaitan erat dengan metode diplomasi yang Indonesia akan jalankan. Dalam hal ini bantuan luar negeri menjadi salah satu instrumen diplomasi dalam memperoleh kepercayaan atau meraih kepentingan nasional dari Indonesia. *Charm Offensive* atau bisa yang disebut juga dengan diplomasi pesona ofensif merupakan sebuah metode diplomasi suatu negara dengan memberikan bantuan luar negeri atau investasi kepada negara resipien dengan tujuan menjadi sekutu atau mendukung motif politik-ekonomi negara tersebut (Sonnevend, 2019). Metode diplomasi ini kini sudah dijalankan oleh Tiongkok melalui kebijakan *One Belt One Road* di negara-negara kawasan Afrika dan Asia Tenggara. Tiongkok memiliki ambisi dengan *'China Dream'*-nya dengan tujuan menjadi pemain utama atau hegemoni global di waktu yang akan datang (Acharya, 2008). Melalui berbagai investasi dan bantuan luar negeri yang diberikan, Tiongkok kini secara perlahan sudah kuat dalam halnya dukungan karena peranannya melalui *Charm Offensive* tersebut. *Charm Offensive* membutuhkan biaya yang mahal karena harus memberikan bantuan dan investasi kepada negara lain, namun yang

menjadi pertimbangannya adalah metode diplomasi ini menjadi sangat efektif bagi negara-negara yang memang sedang memerlukan bantuan. Pada fungsinya, *Charm Offensive* berkaitan erat juga dengan kekuatan lunak suatu negara untuk menjaga citra dan kepentingan negara pemain utama (Sonnevend, 2019). Tindakan teknikal melalui bantuan luar negeri pada akhirnya mendorong bentuk diplomasi publik di masyarakat, bahwa negara pemain utama sudah berbuat dengan baik dan arif, sehingga dihargai sebagaimana teman atau sahabat negara (Kurlantzick, 2007). Walau terlihat halus dan membantu, perlu diingat pula bahwa terdapat banyak tantangan yang sifatnya domino, yang dapat menggagalkan fungsi utama dari *charm offensive* tersebut.

Berkaitan dengan penelitian ini, *Charm Offensive* akan dikaitkan implementasinya melalui motif Indonesia dalam memberikan bantuan luar negeri kepada negara-negara Pasifik Selatan. Patron peristiwa yang digunakan ialah melalui *Indonesian Aid* dan gelaran kerjasama *Pacific* Elevation. Motif tersebut kemudian diturunkan kembali untuk melihat lebih dalam apakah bantuan luar negeri yang dilakukan oleh Indonesia dapat efektif untuk meredam retorika negara-negara Pasifik Selatan dalam mendukung kemerdekaan Papua Barat beserta tantangannya.

## METODE PENELITIAN

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik penelitian kualitatif. Teknik ini digunakan dengan cara mengumpulkan atau mengaitkan banyak peristiwa, pernyataan ataupun kejadian sehingga menjadi satu kesatuan yang disebut dengan teori. Bakry (2016), mengungkapkan bahwa tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memahami dan menafsirkan perilaku-perilaku dalam iklim interaksi sosial. Sesuai dengan kasus dalam penelitian ini, maka penulis dengan teknik penelitian ini akan menelaah pengertian dan peran dari *Charm Offensive* yang dilakukan oleh Indonesia melalui bantuan luar negeri kepada negara-negara di Pasifik Selatan.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah berbasis pada dokumen dan internet. Sumber-sumber data tersebut dikumpulkan melalui dokumen-dokumen resmi dan sekunder yang diperoleh dari internet. Bentuknya bisa berupa buku, laporan, artikel jurnal, maupun berita-berita. Dengan menggunakan metode kajian literatur, penelitian ini berusaha untuk mencari data-data yang baik itu berbentuk angka maupun kata-kata mengenai informasi kebijakan luar negeri Indonesia melalui *Charm Offensive* di negara-negara Pasifik Selatan dalam rangka meredam isu kemerdekaan Papua Barat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Refleksi Hubungan Indonesia & Negara-Negara Kawasan Pasifik Selatan: Mitra Dagang & Bantuan Luar Negeri

Sebagai negara-negara tetangga di sisi timur Indonesia, negara-negara Pasifik Selatan seperti Papua Nugini, Palau, Samoa, Vanuatu, Kepulauan Solomon, Mikronesia, Nauru, Fiji dan sebagainya (mengecualikan Australia, Selandia Baru, dan Timor Leste) telah memiliki hubungan diplomatik ataupun dagang dalam tempo waktu yang lama. Fiji menjadi negara resmi pertama di kawasan baskom Pasifik yang memulai hubungan kerjasamanya dengan Indonesia. Kerjasama tersebut dimulai pada tahun 1974 (JPNN.com, 2017). Sebenarnya sebelum itu ada Papua Nugini yang memang sudah saling berhubungan untuk melakukan kerjasama, tetapi secara resmi dan penuh di tahun 1975, Papua Nugini baru memperoleh kemerdekaannya sebagai suatu entitas negara (May, 2004). Pada tahun-tahun berikutnya kemudian diikuti oleh Vanuatu, Samoa, Kepulauan Solomon dan seterusnya. Jika dapat dilihat dari lamanya hubungan yang telah terjalin antara Indonesia dengan negara-negara Pasifik Selatan tersebut, sebenarnya tentu saja kerjasama-kerjasama yang memang sebelumnya sudah pernah dilakukan seharusnya mampu menjadi pengerat hubungan antar kedua negara.

Dalam bidang perdagangan banyak negara-negara di Pasifik Selatan yang memang secara intensif telah menjadi mitra dengan Indonesia. Hal-hal tersebut dapat dilihat dari peningkatan nilai perdagangan negara mitra yaitu Pasifik Selatan dengan Indonesia melalui data berikut ini.

**Tabel 1.** Neraca Perdagangan Indonesia Dengan Mitra Dagang di Kawasan Pasifik Selatan (Nilai : Ribu US$)

| NEGARA/ TAHUN | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Fiji | 23,543.6 | 26,228.8 | 27,091.8 | 21,520.4 |
| Kep. Solomon | 17,119.7 | 20,918.8 | 14,023.9 | 14,243.5 |
| Papua Nugini | 208,894 | 256,195 | 212,641 | 172,380 |
| Samoa | 6,986.6 | 8,223.7 | 9,587.3 | 14,641.7 |
| Tonga | 3,309.4 | 3,696.8 | 3,835.3 | 4,397.1 |
| Tuvalu | 92.4 | 41.9 | 7,632.1 | 1,728.9 |
| Vanuatu | 4,681.6 | 5,263.0 | 4,917.0 | 18,418.6 |

*Sumber: Statistik Kementerian Perdagangan RI (2017-2020)*

Merujuk pada data tersebut, rata-rata neraca perdagangan Indonesia dengan mitra dagang di Pasifik Selatan mengalami peningkatan yang bisa dikatakan sebagai

tren peningkatan yang tinggi. Sebagai keterangan bahwa pada tahun 2020 terjadi penurunan nilai dagang di beberapa negara, hal itu disebabkan karena adanya pandemi global yaitu, COVID-19. Meski begitu, data yang tertera menunjukkan bahwa adanya kepercayaan dagang antara Indonesia dengan negara-negara di Pasifik Selatan, yang secara tidak langsung menunjukkan adanya hubungan baik yang terjalin secara signifikan dan membawa keuntungan pada negara-negara yang terlibat. Hubungan dagang lainnya ditunjukkan melalui adanya *Preferential Trade Agreement* antara Indonesia dengan Papua Nugini dan Fiji di tahun 2019 (Kementerian Luar Negeri RI, 2019). Merujuk pada hal tersebut, peningkatan kerjasama dagang menuju zona perdagangan bebas juga mendorong adanya peningkatan hubungan erat dalam linearitas pandangan politik negara terhadap suatu isu tertentu.

Berikutnya adalah mengenai hubungan kerjasama melalui bantuan luar negeri yang diberikan Indonesia kepada negara-negara di kawasan Pasifik Selatan. Selain investasi, bantuan yang diberikan oleh Indonesia ke negara-negara tersebut, juga bisa berupa *workshop* atau *sharing of knowledge* mengenai pertanian, lingkungan, dan pemberdayaan UMKM. Adapun kerjasama tersebut salah satunya diimplementasikan melalui kerja sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) dengan negara-negara di Pasifik Selatan (Dewi, Apresian, Vrameswari Omega, Pangestika, & Gianni, 2018). *Look East Policy* yang juga merupakan bagian dari kebijakan luar negeri Indonesia di kawasan Pasifik, mendorong peranan aktif Indonesia untuk memberikan perhatian, bantuan bencana serta pelatihan kepada negara-negara Pasifik Selatan yang terdampak oleh adanya bencana perubahan iklim. Secara infrastruktur Indonesia juga membuktikan peranannya dalam bentuk bantuan pembangunan proyek infrastruktur di Kepulauan Solomon. Hibah berupa dana pembangunan kompleks olahraga bagi Kepulauan Solomon yang pada tahun 2023 akan menjadi tuan rumah *Pacific Games* (Kementerian Luar Negeri RI, 2020b). Pada bidang pertanian & mitigasi bencana, bantuan luar negeri seringkali diberikan oleh Indonesia dalam bentuk *sharing of knowledge* melalui workshop (Kementerian Luar Negeri RI, 2020a). Melihat banyaknya jenis bantuan luar negeri Indonesia yang dari tahun ke tahun meningkat dan jumlahnya yang tentunya tidak sedikit diberikan kepada negara-negara tersebut, peran aktif *take and give* yang diberikan oleh negara-negara Pasifik Selatan seharusnya mulai terlihat.

Namun selama tahun 2016-2020 apakah hubungan Indonesia dengan negara-

negara tersebut baik dijalankan? Peristiwa isu kemerdekaan Papua ternyata menjadi penghambat hubungan dengan negara-negara tersebut. Keterlibatan beberapa negara seperti Vanuatu dan Kepulauan Solomon di Sidang Tahunan PBB yang selalu mendukung kelompok-kelompok separatis Papua, menjadi batu sandungan hubungan Indonesia dengan negara tersebut. Suatu hal yang menarik jika dipantau sejak tahun 2016, ternyata makin menuju tahun 2020 negara-negara tersebut ternyata sudah memilih diam tanpa intervensi kecuali Vanuatu (CNN Indonesia, 2020). Disini secara teknis dapat dikatakan Indonesia sudah menjalankan diplomasi tekniknya melalui peningkatan mitra dagang dan variasi bantuan luar negeri yang telah dilakukan semenjak tahun 2019.

**Motif & Peran Indonesia di Kawasan Pasifik Selatan: Tinjauan terhadap *Charm Offensive***

Dalam memandang aksi dan tindakan serta respon kepada negara-negara di kawasan Pasifik Selatan, dapat ditinjau berdasarkan tiga motif bantuan luar negeri oleh Andersson (2009) yaitu secara kemanusiaan, ekonomi, dan strategik atau politis.

1. *Motif Kemanusiaan*

   Kawasan Pasifik merupakan negara-negara yang cenderung riskan akan adanya bencana alam. Selain karena faktor perubahan iklim, negara-negara tersebut berada di jalur *Ring of Fire* yang di dalamnya terdapat gunung-gunung aktif baik di daratan maupun laut. Negara-negara tersebut memiliki potensi tinggi terhadap efek domino yang terjadi karena bencana alam. Contohnya kepada Nauru, Indonesia membantu dalam bentuk bantuan mitigasi bencana alam dalam rangka memperlambat kenaikan level air yang berpotensi menenggelamkan pulau-pulau di Nauru (Sohuturon, 2017). Selain itu saat masa krisis pandemi, Indonesia juga membantu Fiji & Kepulauan Solomon berupa hibah untuk pencegahan kenaikan air laut dan pengadaan alat-alat kesehatan (JPNN.com, 2020). Sejak tahun 2019, Indonesia meluncurkan *Indonesian AID* sebagai badan penampung dana untuk bantuan luar Indonesia. *Indonesian AID* tersebut diluncurkan sebagai bentuk ‘diplomasi tangan di atas’ oleh Indonesia kepada negara-negara yang memerlukan bantuan, seperti halnya negara-negara di Pasifik Selatan.

2. *Motif Ekonomi*

   Ekonomi baik itu kelancaran transaksi perdagangan ataupun investasi dapat menjadi salah satu motif suatu negara donor memberikan bantuan luar negeri ke negara-negara resipien. Semakin banyaknya bantuan yang diberikan oleh negara donor, semakin membuka peluang keterikatan kerjasama dan keterbukaan peluang pada sektor-sektor strategis seperti ekonomi. Dalam perkembangannya Indonesia berusaha mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5% dengan membidik pasar mitra dagang kontemporer (Librianty, 2021). Negara-negara Pasifik Selatan dapat dikategorikan sebagai pasar-pasar mitra dagang kontemporer RI. Beberapa ekspor besar yang dilakukan oleh Indonesia ke negara-negara di Pasifik Selatan, yaitu ke negara Papua Nugini dan Fiji. Sebagai sebuah patron bantuan luar negeri, Indonesia mencanangkan suatu forum kerjasama bersama dalam bidang perdagangan, investasi, pariwisata, seni budaya dan teritori melalui kemitraan *Pacific Elevation*. *Pacific Elevation* ini sendiri merupakan tindak lanjut dari *Indonesia-South Pacific Forum* (ISPF) yang digagas pada tahun 2019, sebagai rangkaian usaha Indonesia mendekatkan diri kepada negara-negara Pasifik Selatan. Dalam kerjasama *Pacific Elevation* tersebut, terdapat satu forum bernama *Pacific Exposition* yang dimana diselenggarakan sebagai forum diskusi para pemimpin perusahaan antar negara mengenai potensi kerjasama yang dapat dilakukan (Bernama, 2020). Dengan melihat begitu besarnya pasar dan investasi yang dapat dilakukan Indonesia di kawasan Pasifik Selatan, maka bantuan luar negeri bisa memperlancar motif ini.

3. *Motif Strategik atau Politis*

   Secara politis bantuan luar negeri dapat dipergunakan sebagai sebuah instrumen politis oleh negara pendonor kepada negara resipien untuk saling beraliansi, menyamakan pandangan, dan mencegah intervensi negara resipien tersebut terhadap kepentingan negara donor. Keterlibatan negara-negara Pasifik Selatan di pentas internasional ataupun forum-forum seperti *Pacific Island Forum* atau *Melanesian Spearhead Group* dalam menyuarakan isu mengenai hak asasi dan kemerdekaan Papua,

membuat Indonesia secara teknis melakukan kebijakan bantuan luar negeri di negara-negara kawasan Pasifik Selatan tersebut (Fadhilah, 2019). Kekuatan atau *power* yang digunakan oleh negara-negara dengan kekuatan yang lebih besar melalui kebijakan bantuan luar negeri, disinyalir dapat menggenggam suara negara yang selalu mengganggu kepentingan nasional ataupun dapat digunakan sebagai kawan aliansi/*proxy*. Indonesia secara politis dapat dikatakan memerlukan dukungan untuk menentang kelompok-kelompok separatis kemerdekaan Papua tersebut. Keterlibatan Indonesia sebagai negara mitra dari forum *Melanesian Spearhead Group* selalu dengan diplomatis agar isu mengenai kemerdekaan Papua Barat agar tidak perlu diangkat. Lebih dalam lagi bahwa bantuan luar negeri bisa menjadi *reward* bagi negara-negara resipien yang sedang mencari kepentingan nasionalnya, dengan cara menuruti kepentingan dari negara pendonor.

Berdasarkan motif-motif tersebut dapat ditinjau bahwa bantuan luar negeri dapat menjadi hadiah bagi negara-negara resipien seperti negara-negara di kawasan Pasifik Selatan. Setiap resipien bantuan, pasti berpikir bahwa perlu adanya balas budi ketika suatu negara pendonor melakukan tindakan yang baik kepada negaranya, apalagi yang membantu kepentingan nasional. Hasil dari tindakan tersebutlah yang pada akhirnya memicu sebuah pemahaman yaitu *game theory 'stick and carrot'*, yang dimana ketika negara memilih untuk bekerjasama maka akan mendapatkan manfaat yang baik, namun jika negara menolak maka akan mendapatkan kesulitan ataupun hukuman dari negara tersebut. Seperti pada kasus kemerdekaan Papua, bantuan luar negeri dipergunakan Indonesia sebagai negara yang memiliki *power* lebih dibandingkan negara-negara di kawasan Pasifik Selatan agar negara-negara tersebut menjadi lebih 'jinak' dan tidak mencampuri kepentingan Indonesia pada isu Papua.

Tindakan Indonesia melalui motif-motif tersebut dapat dikatakan sebagai suatu *charm offensive*. Dengan banyaknya bantuan yang dapat diberikan ketika negara-negara tersebut membutuhkan, setidaknya kepentingan nasional Indonesia dapat tersampaikan dengan baik tanpa harus khawatir diganggu Kembali oleh negara-negara tersebut. *Charm offensive* ini dapat menjadikan *branding* Indonesia juga menjadi lebih baik di mata masyarakat negara-negara resipien di Pasifik Selatan

karena kesan baik yang diberikan oleh Indonesia kepada negara-negara tersebut. *Charm offensive* yang menjadi bagian dari diplomasi publik melalui bantuan luar negeri, setidaknya dapat menetralisir hal-hal atau intervensi negatif yang mengganggu kepentingan nasional Indonesia pada isu Papua.

*Indonesian AID*, *Pacific Elevation* ataupun strategi lainnya melalui kebijakan luar negeri "*Look East Policy"* melancarkan diplomasi teknis Indonesia dalam menggenggam retorika intervensi atas masalah Papua yang seringkali digaungkan oleh negara-negara Pasifik Selatan. *Charm offensive* bertindak secara taktis dan seringkali tidak dapat disadari motifnya, karena menggunakan iming-iming bantuan luar negeri, layaknya sebagai bentuk kebaikan negara pendonor kepada negara resipien.

**Dimensi Tantangan *Indonesia' Charm Offensive* : Domestik & Internasional**

Dalam implementasi *Indonesia' Charm Offensive* melalui bantuan luar negeri, tentu saja Indonesia menghadapi serangkaian tantangan yang dapat menghambat kepentingan nasional Indonesia dalam menghadapi tren isu kemerdekaan Papua Barat oleh negara-negara Pasifik Selatan. Dimensi tantangan tersebut terbagi dalam dua lapisan, yaitu tantangan secara domestik tantangan secara internasional mengenai masalah Papua.

Secara domestik berikut ini adalah tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dalam mengamankan *charm offensive*-nya di negara-negara kawasan Pasifik Selatan. *Pertama*, masih terdapatnya aktor non-negara yang pro atas kemerdekaan Papua, termasuk para eksil seperti Veronica Koman dan Benny Wenda. Para aktor-aktor tersebut memainkan peranannya dari luar wilayah atau luar negeri, untuk terus secara lantang menyuarakan kemerdekaan mengenai Papua. Para eksil tersebut tentu saja tidak berjalan secara sendiri, mereka mendapatkan dukungan dari para diaspora yang membelot ataupun para warga negara asing yang pro terhadap kemerdekaan Papua. *Kedua*, sekuritisasi isu Papua dengan metode kekerasan dan *labelling* teroris terhadap Kelompok Pemberontak Papua yang berpotensi menimbulkan stigma buruk bagi masyarakat Papua di luar Papua dan salah sasaran militerisasi Indonesia terhadap warga sipil. Sekuritisasi ini seperti yang dapat diketahui selama tahun 2015-2019 menyebabkan mudahnya masyarakat-masyarakat di negara-negara Pasifik Selatan yang memang pro akan kemerdekaan Papua untuk masuk melalui isu hak asasi manusia atau penindasan atas kemanusiaan rakyat di Papua. *Ketiga*, tidak

meratanya pembangunan dan pemaksaan perusakan lahan di Papua. Ketidakadilan dan ketimpangan secara vertikal maupun horizontal dalam ranah sosial, politik dan ekonomi menjadi penyebab utama mengapa masyarakat Papua ada yang memilih untuk bisa 'lepas' dari Indonesia. Banyaknya wacana seperti penyediaan lahan bagi perusahaan asing dan perusakan kawasan hutan untuk kepentingan elit tertentu, dapat berpotensi menghambat *charm offensive* dari dalam Indonesia itu sendiri.

Berikutnya secara internasional, tantangan yang dihadapi oleh Indonesia berkaitan erat dengan intermestik yang ada dari keterlibatan eksil atau diaspora yang mendukung kemerdekaan Papua untuk lepas dari Indonesia. Selain itu kegagalan *charm offensive* dapat terjadi bilamana negara-negara resipien di Pasifik Selatan melakukan pengkhianatan atas kerjasama yang telah dilakukan. Terakhir, dalam dimensi internasional karena Papua menurut Daud Joesoef (2015) merupakan bagian dari jantung geopolitik dunia, tidak menampik kemungkinan adanya peran dari aktor-aktor negara kekuatan besar seperti Amerika Serikat, China, Rusia dan sebagainya, dapat menghambat proses *charm offensive* Indonesia dalam meredam retorik isu Papua oleh negara-negara di kawasan Pasifik Selatan.

## KESIMPULAN

Dalam meredam isu permasalahan mengenai kemerdekaan Papua, Indonesia menggunakan diplomasi teknisnya melalui metode *charm offensive*. *Charm offensive* tersebut menggunakan dukungan bantuan luar negeri sebagai alat kepentingan nasional untuk meredam isu mengenai Papua bagi negara-negara di kawasan Pasifik Selatan oleh Indonesia. Sebagai refleksi hubungan antara Indonesia dengan negara-negara tersebut, Indonesia secara intensif terus melakukan peningkatan intensif dengan teknik mitra kerjasama ataupun bantuan luar negeri yang dipatroni oleh tindakan-tindakan seperti *Indonesian AID* ataupun *Pacific Elevation*. Dalam pelaksanaannya bantuan luar negeri yang Indonesia lakukan kepada negara-negara tersebut, ditemui tiga jenis motifnya, baik itu secara kemanusiaan, ekonomi, maupun strategis atau politis. Proses *charm offensive* masih akan terus dijalankan hingga isu sudah mereda dan negara-negara di Pasifik Selatan tersebut memilih untuk tidak terlibat atau tidak melakukan intervensi di forum-forum internasional. Meskipun begitu, secara domestik dan internasional masih banyak tantangan yang dihadapi oleh Indonesia agar *charm offensive* melalui bantuan luar negeri kepada negara-negara Pasifik Selatan efektif untuk dapat dijalankan. Maka dari

itulah, perlu adanya penguatan kembali teknis diplomasi dan dialog pelurusan masalah antara Indonesia dan negara-negara Pasifik Selatan sehingga selain menggunakan *track* bantuan luar negeri, klarifikasi isu Papua melalui komunikasi intensif dengan negara-negara di Pasifik Selatan dapat berjalan dengan baik dan lancar.

## REFERENSI

Absulsalam, H. (2019, February 6). Siapa Kawan dan Lawan Indonesia di Melanesia Soal Papua Merdeka? - Tirto.ID. Retrieved May 9, 2021, from https://tirto.id/siapa-kawan-dan-lawan-indonesia-di-melanesia-soal-papua-merdeka-df4R

Acharya, A. (2008). China's Charm Offensive in Southeast Asia. In *Asia Rising: Who is Leading?* (pp. 3–5). WORLD SCIENTIFIC. https://doi.org/10.1142/9789812771346_0001

Andersson, M. (2009). *Motives behind the Allocation of Aid-A Case Study Regarding Swedish Motives for Aid Allocation*.

Bakry, U. S. (2016). Metode Kualitatif dan Kuantitatif dalam Penelitian Hubungan Internasional. In *Metode Penelitian Hubungan Internasional* (pp. 18–20). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Bernama, A. (2020, March 19). Pacific Elevation, Silaturahmi ala Indonesia ke Pasifik Selatan | kumparan.com. Retrieved May 11, 2021, from https://kumparan.com/allessandro-bernama/pacific-elevation-silaturahmi-ala-indonesia-ke-pasifik-selatan-1t3TUOlJIEA/full

Burchill, S. (2003). *National interest in the theory of international relations*. Retrieved from http://dro.deakin.edu.au/view/DU:30026732

Chauvel, R. (2004). *Constructing Papuan Nationalism: History, Ethnicity, and Adaptation*. Washington. Retrieved from https://www.jstor.org/stable/pdf/resrep06503.pdf

CNN Indonesia. (2020, October 1). Kemlu: Hanya Vanuatu Angkat Isu HAM Papua di Sidang PBB. Retrieved May 10, 2021, from https://www.cnnindonesia.com/internasional/20201001141539-106-553206/kemlu-hanya-vanuatu-angkat-isu-ham-papua-di-sidang-pbb

Dewi, E. A., Apresian, S. R., Vrameswari Omega, M. W., Pangestika, F. E., & Gianni, A. (2018). KOLABORASI ANTARA INDONESIA DAN NEGARA-NEGARA KEPULAUAN PASIFIK DALAM MENGHADAPI TANTANGAN LINGKUNGAN. *Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Katolik Parahyangan*.

Fadhilah, M. (2019). Inkonsistensi Kebijakan Luar Negeri Melanesia Spearhead Group (MSG) dalam Isu Papua Barat: Studi Kasus Fiji dan Papua Nugini 1. In *ejournal.undip.ac.id* (Vol. 4). Retrieved from https://ejournal.undip.ac.id/index.php/ip/article/view/24480

Hattori, T. (2001). Reconceptualizing foreign aid. *Review of International Political Economy*, *8*(4), 633–660. https://doi.org/10.1080/09692290110

077610

Joesoef, D. (2015). *Studi Strategi: Logika Ketahanan dan Pembangunan Nasional*. Jakarta: Kompas.

JPNN.com. (2017, September 6). Ketua DPR: Fiji Sahabat Sejati Indonesia - Nasional JPNN.com. Retrieved May 10, 2021, from https://www.jpnn.com/news/ketua-dpr-fiji-sahabat-sejati-indonesia

JPNN.com. (2020, December 16). Solidaritas di Masa Pandemi, Indonesia Beri Bantuan kepada Dua Negara Pasifik Ini - Internasional JPNN.com. Retrieved May 10, 2021, from https://www.jpnn.com/news/solidaritas-di-masa-pandemi-indonesia-beri-bantuan-kepada-dua-negara-pasifik-ini

Kementerian Luar Negeri RI. (2019). *The Ministers herewith officially launch the negotiations process for the Indonesia-Papua New Guinea Preferential Trade Agreement (IPNG-PTA) with the*. Retrieved from https://treaty.kemlu.go.id/apisearch/pdf?filename=PNG-2019-0085.pdf

Kementerian Luar Negeri RI. (2020a). *Laporan Kinerja Kementerian Luar Negeri Tahun 2019*. Retrieved from https://kemlu.go.id/download/L3NpdGVzL3B1c2F0L0RvY3VtZW50cy9BS0lQL0tlbWVudGVyaWFuJTIwTHVhciUyME5lZ2VyaS9MYXBvcmFuJTIwS2luZXJqYSUyMEtlbWVudGVyaWFuJTIwTHVhciUyME5lZ2VyaSUyMFRhaHVuJTIwMjAxOSUyMChCdWt1JTIwSSkucGRm

Kementerian Luar Negeri RI. (2020b, December). Indonesia Bangun Kompleks Olahraga Di Kepulauan Solomon | Portal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Retrieved May 10, 2021, from https://kemlu.go.id/portal/id/read/2007/berita/indonesia-bangun-kompleks-olahraga-di-kepulauan-solomon

Kurlantzick, J. (2007). *Charm Offensive (How China's Soft Power Is Transforming the World)*. Michigan.

Lawson, S. (2016). West Papua, Indonesia and the Melanesian Spearhead Group: competing logics in regional and international politics. *Australian Journal of International Affairs*, *70*(5), 506–524. https://doi.org/10.1080/10357718.2015.1119231

Librianty, A. (2021, March 5). Bidik Mitra Dagang Baru, Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Harus 5 Persen - Bisnis Liputan6.com. Retrieved May 11, 2021, from https://www.liputan6.com/bisnis/read/4498556/bidik-mitra-dagang-baru-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-harus-5-persen

May, R. . (2004). 'MUTUAL RESPECT, FRIENDSHIP AND COOPERATION'? THE PAPUA NEW GUINEA-INDONESIA BORDER AND ITS EFFECT ON RELATIONS BETWEEN PAPUA NEW GUINEA AND INDONESIA from State and Society in Papua New Guinea: The First Twenty-Five Years on JSTOR. In *State and Society in Papua New Guinea: The First Twenty-Five Years* (pp. 286–301). ANU Press. Retrieved from https://www.jstor.org/stable/j.ctt2jbkfq.18?refreqid=excelsior%3Ab401cdce6491a6b9f148c66573058cf6&seq=1#metadata_info_tab_contents

Media Indonesia. (2019). Babak Baru Kerja

Sama Indonesia dan Kawasan Pasifik Selatan. Retrieved May 9, 2021, from https://mediaindonesia.com/internasional/224618/babak-baru-kerja-sama-indonesia-dan-kawasan-pasifik-selatan

Navari, C. (2016). Hans Morgenthau and the National Interest. *Ethics and International Affairs*, *30*(1), 47–54. https://doi.org/10.1017/S089267941500060X

Oppenheim, F. E. (1987). National Interest, Rationality, and Morality. *Political Theory*, *15*(3), 369–389. https://doi.org/10.1177/0090591787015003006

Ramakhrisna, S. (2018). Strategic Motivations of Foreign Aid in a Changing World | Chicago Policy Review. Retrieved May 9, 2021, from The University of Chicago, Harris School of Public Policy website: https://chicagopolicyreview.org/2018/03/03/strategic-motivations-of-foreign-aid-in-a-changing-world/

Salya, S. (2017). *DIPLOMASI PUBLIK INDONESIA TERHADAP MELANESIAN SPEARHEAD GROUP DALAM MENGONTER ISU PAPUA MERDEKA*. Retrieved from https://repository.unpad.ac.id/frontdoor/index/index/year/2020/docId/21114

Sohuturon, M. (2017, December 8). Indonesia dan Nauru Antisipasi Iklim Ekstrem di Asia-Pasifik. Retrieved May 10, 2021, from CNN Indonesia website: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171208151659-12-261096/indonesia-dan-nauru-antisipasi-iklim-ekstrem-di-asia-pasifik

Sonnevend, J. (2019). Charm offensive: mediatized country image transformations in international relations. *Information Communication and Society*, *22*(5), 695–701. https://doi.org/10.1080/1369118X.2019.1568516

Sugandi, Y. (2008). *Analisis Konflik dan Rekomendasi Kebijakan mengenai Papua*. Jakarta. Retrieved from www.fes.or.id

Yambeyapdi, E. (2018). Papua: Sejarah Integrasi yang Diingat dan Ingatan Kolektif. In *Indonesian Historical Studies* (Vol. 2). Retrieved from https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/ihis/article/view/3749